

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Terjemahan Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media, 2018. Cetakan ke-6.
- Magnis Suseno, Franz, dan Philip Alston. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Pratiwi, Cekli Setya. *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. Malang: UMM Press, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rahayu, Devi. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet ke-12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Supriyanto, Hari. *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik: Studi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004.

Tim Dosen Fakultas Hukum UGM. *Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Jurnal

Dalimunthe, Nikmah, dan Fitria Nurhaliza. "Analisis Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Pada UU Cipta Kerja Mengenai Perlindungan Hak Pekerja." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, No. 3 Desember 2023.

Fauzi, M. Asif Nur. "Kesadaran Tenaga Kerja Dalam Hak-Hak Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal HAM* 6, No. 2, 2023.

Hernawan, Ari. "Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial", *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, November 2011.

Hernawan, Ari. "Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum* No. 3, Vol. 30, September 2023.

Fitria, Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi." *Lex Jurnalica* 15, No. 3, Desember 2018.

Pramana Putra, Andika. "Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Atas Perkara No. 825 K/PDT.SUS-PHI/2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi", *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1, 2018.

Putri, Kerenhapukh Milka Tarmadi, dan Gunardi Lie. “Pengaruh Kebijakan Efisiensi Sebagai Alasan Penjatuhan PHK: Perbandingan Antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 11, November 2023.

Ramadhan Hananto, Muhammad dan Gunardi Lie. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan”, *Jurnal Hukum UNES*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

Santoso, Budi. “Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan PHK.” *Jurnal Mimbar Hukum* 25, No. 3, Oktober 2013.

Wajdi, Farid, dan Imran. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013.” *Jurnal Yudisial* 14, No. 2, Agustus 2021.

Wibowo, Rudi Febrianto, dan Ratna Herawati. “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2021): 111.

Tesis/Disertasi

Aminah, Nenden. “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Alasan dan Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Tesis Program Magister*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Meliala, Jonathan. “Penerapan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 /PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/PDT.SUS-PHI/2017)”, *Tesis Program Magister*, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Zaky Rabbani, Muhammad. “Perlindungan Hukum Preventif Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran yang Bersifat Mendesak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Turunannya”, *Tesis Program Magister*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Internet

Aslan Dewi, SEA Today PHK Sejumlah Karyawan Demi Efisiensi Anggaran, <https://www.tempo.co/ekonomi/sea-today-phk-sejumlah-karyawan-demi-efisiensi-anggaran--1201672> diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

BPJS Ketenagakerjaan. “Apa Saja Manfaat dari Program JKP?” Diakses 22 Juli 2025. <https://halo.jkp.go.id/support/solutions/articles/73000510903-apa-saja-manfaat-dari-program-jkp->.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 22 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/efisiensi>.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB. *Komentar Umum No. 18: Hak atas Pekerjaan (Pasal 6 Kovenan)*. E/C.12/GC/18, 6 Februari 2006. Diakses 12 Juli 2025. <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2006/en/32433>.

Oxford Learner’s Dictionaries. Diakses 22 Maret 2025. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition>.

Serikat Pekerja Nasional. “Pengaturan PHK Efisiensi dalam Peraturan Perundang-undangan.” *SPN.or.id*. Diakses 22 Juli 2025. <https://spn.or.id/pengaturan-phk-efisiensi-dalam-peraturan-perundang-undangan/#:~:text=%E2%80%9D%20Pengusaha%20dapat%20melakukan%20pemutusan%20hubungan%20kerja%20terhadap,penggantian%20hak%20sesuai%20ketentuan%20Pasal%20156%20ayat%20%284%29.%E2%80%9D>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Juni 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg perihal Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan, 21 September 2022.

Lain-Lain

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
General Comment No. 18, 2005.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi
International Labour Organization (ILO) No. 189 Tentang
Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga*, 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma
dan Pengaturan Tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak* No. 14,
2024.

Organisasi Perburuhan Internasional. *Konvensi tentang Pengakhiran
Hubungan Kerja atas Inisiatif Pemberi Kerja*, 1982 (No. 158).